

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS (MBG) : STUDI KASUS PENGELOLAAN DI
SD NEGERI 01 KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS (MBG) : STUDI KASUS PENGELOLAAN DI
SD NEGERI 01 KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ALIFYA PARISTIAN ZAHRA

NIM. 1521012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFYA PARISTIAN ZAHRA
NIM : 1521012
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Pengelolaan di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Yang Menyatakan,



ALIFYA PARISTIAN ZAHRA
NIM. 1521012

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alifya Paristian Zahra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ALIFYA PARISTIAN ZAHRA

NIM : 1521012

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Pengelolaan di SD Negeri 01 Kedungwuni

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Alifya Paristian Zahra

NIM : 1521012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Pengelolaan di SD Negeri 01
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242013211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Penguji II

Uswatun Khasanah, M. S. I

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 10 Juli 2026

Dibaskan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Moehfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَّ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil
-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : Studi Kasus Pengelolaan MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, Aamiin. Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa studi, terima kasih atas pengalaman serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
2. Kepada kedua Orangtua tercinta Bapak Supardi dan Ibu Rismawati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan pertamanya untuk bisa memperoleh pendidikan setinggi-tingginya meski mereka tidak pernah merasakannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan, memberikan motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal

untuk membuat bapak dan ibu bahagia, sehat selalu dan panjang umur karena bapak dan ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

3. Kepada dosen pembimbing Bapak Ayon Diniyanto, M.H. terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Achmad Umardani, M. Sy. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 01 Kedungwuni, terutama Ibu Lulu Sania Dienti selaku guru staf yang terlibat dalam penelitian. Terima kasih telah memberikan banyak wawasan yang berharga untuk dibahas di penelitian ini.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak SMP, yaitu Rasikhah Derusti, Mutiara Nadhifa, dan Afilah Renaudi. Penulis ucapkan terimakasih selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka.
7. Kepada sahabat jauh penulis yaitu Vania Zulfa yang telah memberikan rezeki dalam mendukung penulis mengerjakan skripsi
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang menemani sejak awal kuliah, yaitu Putri Andini Alyza, Nok Ilmawati, Nadhifa Alifia Meisya dan Mawardah Ayuning Eryani. Penulis ucapkan terima kasih selalu mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan staff karyawan Fakultas Syariah maupun staff kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang wanita dengan impian yang tinggi dan menjadi harapan orang tua. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Alifya Paristian Zahra, semoga langkah dari setiap pijakan selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, dan mimpimu satu persatu akan terjawab.

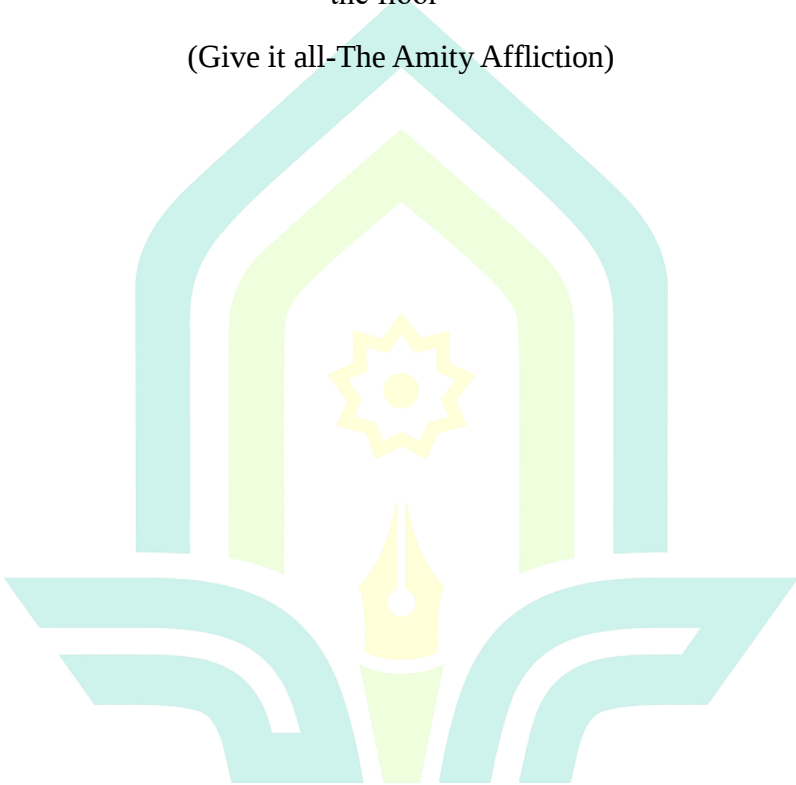


MOTTO

“Dunia boleh saja menahanku, kupunya doa ibu”
(Tapi-Perunggu)

“I give it all and when i fall, i get up and give some more
until there’s nothing left of me. Just some bones stacked on
the floor”

(Give it all-The Amity Affliction)



ABSTRAK

Alifya Paristian 2026. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Studi Kasus Pengelolaan MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen Pembimbing: Ayon Diniyanto, M. H.

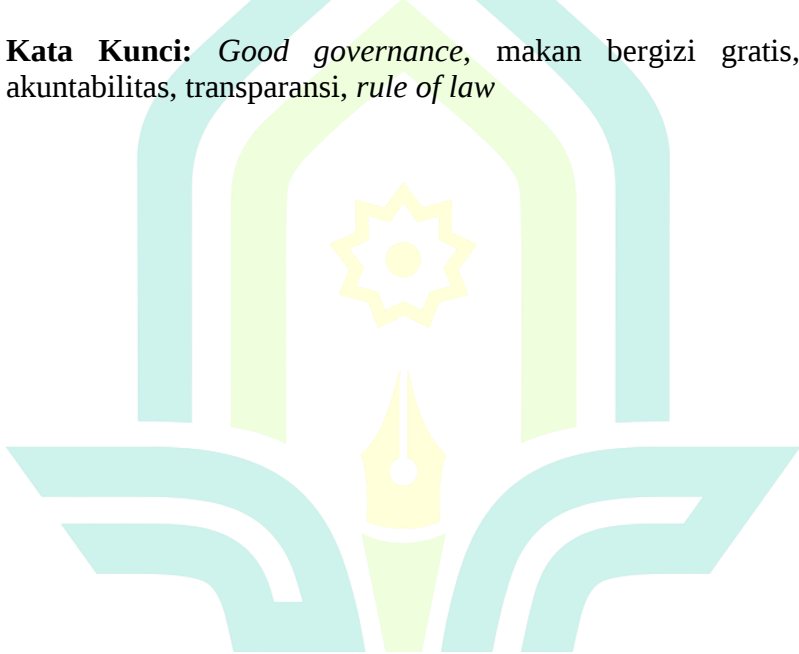
Latar belakang penelitian ini berawal dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan, yang melibatkan wawancara dengan stakeholder SD Negeri 01 Kedungwuni, yaitu meliputi guru, orang tua dan siswa. Hasil wawancara tersebut disertai dokumentasi Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif dengan menggunakan teori *good governance* dan konsep makan bergizi gratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip *good governance* telah diterapkan seperti akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan, namun pelaksanaannya belum optimal. Sebaliknya, prinsip transparansi dan *rule of law* belum diterapkan, sebagaimana tercermin dalam ketiadaan persetujuan tertulis dari orang tua, kurangnya media informasi yang memadai mengenai gizi, serta tidak adanya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis secara formal di pihak sekolah.

Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa rendahnya kepastian hukum, potensi sengketa administratif, serta kesulitan pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang merugikan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan dokumentasi administratif, penyediaan materi informasi gizi, penerapan regulasi secara tertulis, serta peningkatan fungsi pengawasan oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Penerapan prinsip *good governance* pada akhirnya tidak hanya penting untuk keberhasilan program, tetapi juga untuk perlindungan hak dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pemerintah.

Kata Kunci: *Good governance*, makan bergizi gratis, akuntabilitas, transparansi, *rule of law*



ABSTRACT

Alifya Paristian 2026. *Enforcement Of Good Governance Principles In The Implementation Of The Nutritious Free Meal Program (MBG): A Case Study of MBG Management at State Elementary School 01 Kedungwuni Pekalongan Regency. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Ayon Diniyanto, M. H.

The background to this research is motivated by the implementation of the free nutritious meals (MBG) programme, which is one of the government's strategic initiative aimed at meeting the nutritional needs of schoolchildren while supporting the development of high-quality human resources. The study aim to analyze the application of good governance principles in the implementation of the MBG programme at State Elementary school 01 Kedungwuni Pekalongan Regency and to identify the legal consequences arising from its implementation through.

This research used a employs an empirical-juridical approach by combining legislative, case-based, and conceptual approaches. Data were collected through field observations, which included interviews with stakeholders at State Elementary School 01 Kedungwuni, including teachers, parents, and students. The results of these interviews were supplemented with documentation. Data analysis was conducted using descriptive analysis based on the theory of good governance and the concept of the Free Nutritious Meals program.

The research findings indicate that several principles of good governance such as accountability, participation, responsiveness, effectiveness, efficiency, and fairness have been implemented, but their implementation has not yet been optimal. Conversely, the principles of transparency and the rule of law have not been implemented, as reflected

in the absence of written parental consent, the lack of adequate information resources on nutrition, and the absence of formal Standard Operating Procedures (SOPs) or technical guidelines on the part of the school. These conditions give rise to legal consequences, including low legal certainty, the potential for administrative disputes, and difficulties in establishing accountability in the event of adverse outcomes. Therefore, the study recommends strengthening administrative documentation, providing nutritional information materials, implementing written regulations, and enhancing oversight functions by schools, parents, and local governments. The application of good governance principles is ultimately important not only for the success of the program but also for the protection of rights and the enhancement of public trust in the implementation of government programs.

Keywords: *Good governance, free nutritious meals, accountability, transparency, rule of law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang melancarkan proses perizinan penelitian dalam proses skripsi ini hingga selesai.
4. Ayon Diniyanto, M. H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Pihak SD Negeri 01 Kedungwuni terutama Ibu Lulu Sania Dienti selaku Guru yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 3 Juli 2026

Penulis

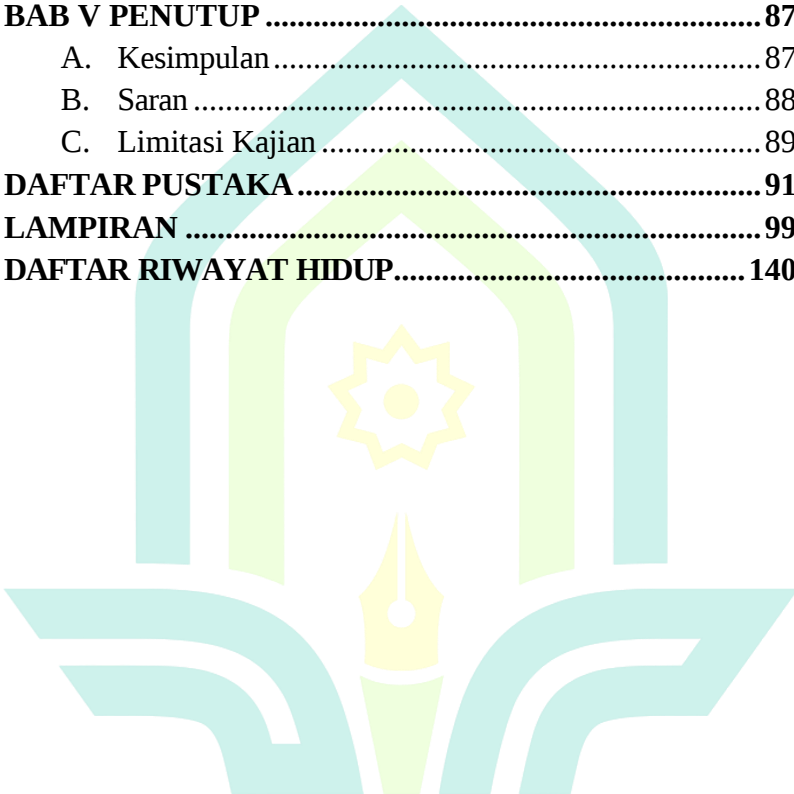


Alifya Paristian Zahra

DAFTAR ISI

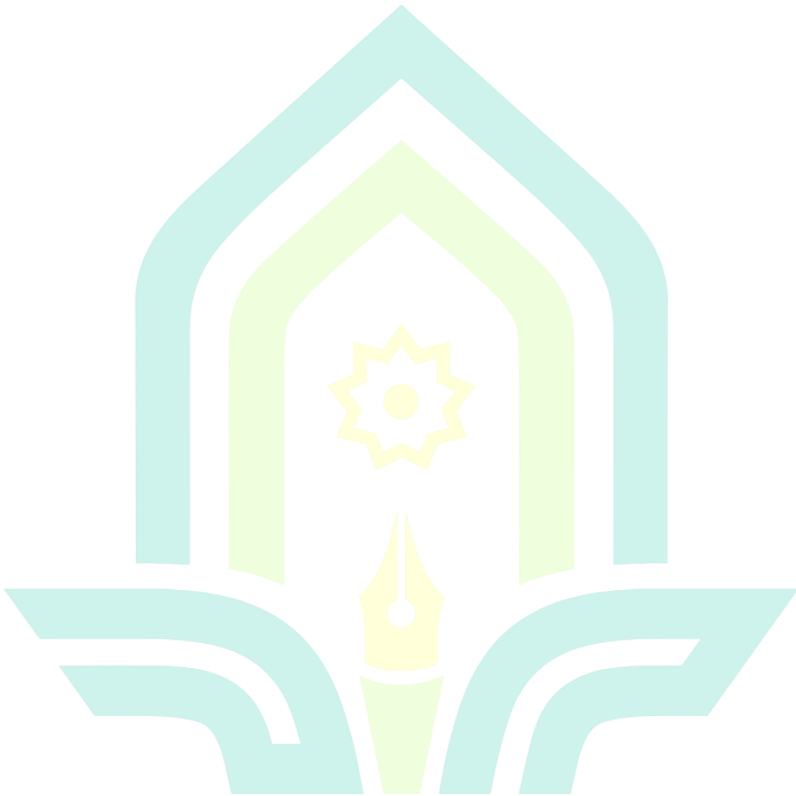
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA	
 KONSEPTUAL.....	20
A. Teori Good Governance	20
B. Konsep Makan Bergizi Gratis	29
BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Pengelolaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 01 Kedungwuni.....	39

BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Program MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni	70
B. Akibat Hukum Dari Belum Terpenuhinya Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 01 Kedungwuni	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Limitasi Kajian	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	140



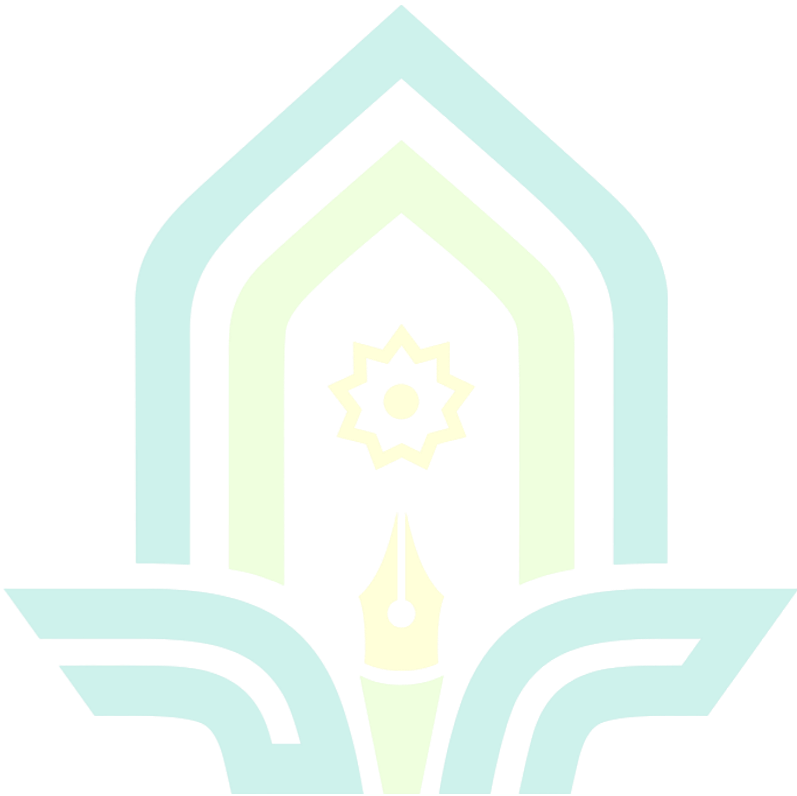
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 4.1 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i>	77
Tabel 4.2 Akibat Hukum 1	80
Tabel 4.3 Akibat Hukum 2	82



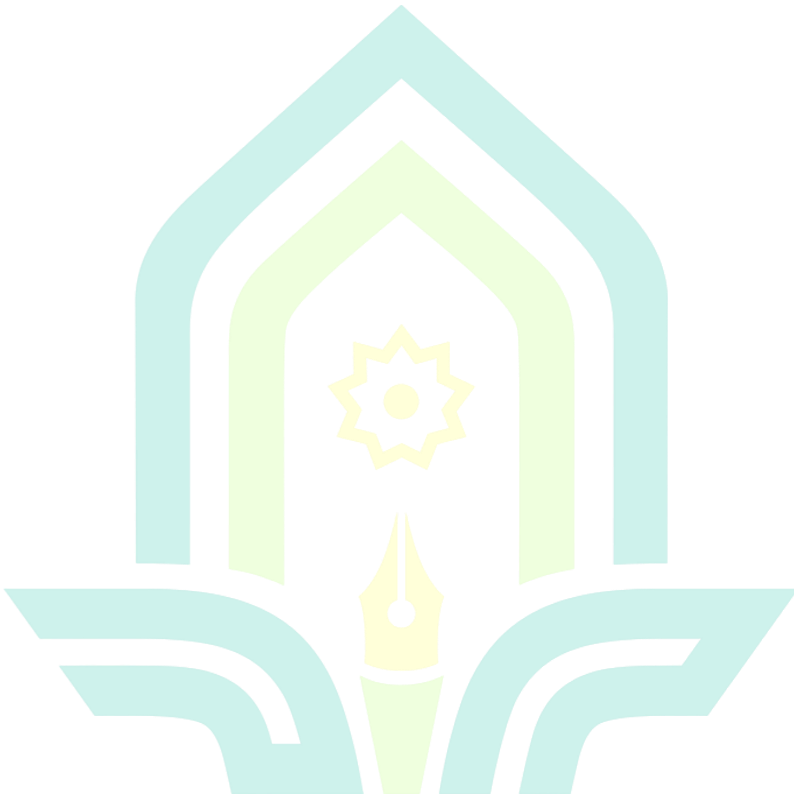
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	38
Gambar 3.2 Alur Kordinasi	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	100
Lampiran 3	Transkrip Wawancara	101
Lampiran 4	Dokumentasi.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gizi buruk pada anak-anak Indonesia merupakan isu kesehatan masyarakat yang mendesak dan berkepanjangan. Berdasarkan data dari buku laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) jumlah stunting anak Indonesia mencapai 19,8%, sedangkan *wasting* mencapai 6,2%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah malnutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan perkembangan anak, tetapi juga pada produktivitas generasi mendatang. Untuk menangani permasalahan ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, mendirikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola program pemenuhan gizi secara nasional. Salah satu mandat utama BGN adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan menekan angka malnutrisi dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak-anak. Program ini dimulai pada tanggal 2 Januari 2025, dengan fokus awal pada pemberian layanan kepada siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari kelompok ekonomi kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Indonesia.

Namun, implementasi program MBG tidak berjalan lancar justru menimbulkan kontroversi publik akibat munculnya sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah. Data Jaringan Pemantauan Pendidikan

Indonesia (JPPI) per September 2025 mencatat bahwa jumlah keracunan MBG di Indonesia mencapai 6,452 orang. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan jumlah korban keracunan sebanyak 722 orang¹.

Tanggal 13 Januari 2026, tercatat 15 siswa SD Negeri 01 Kedungwuni diduga mengalami gejala keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam program MBG². Insiden ini dilaporkan terjadi di Kabupaten Pekalongan. Menu paket MBG yang dibagikan saat itu meliputi bakmi goreng Jawa, telur ceplok, tahu goreng, lalapan timun, serta buah anggur. Makanan tersebut didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidodadi Kedungwuni Timur.

Menanggapi situasi tersebut, Mochammad Idhar Khaerul sebagai Kepala SPPG Sidodadi Kedungwuni Timur, menyampaikan bahwa timnya telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebelum distribusi dilakukan. Pihaknya menyatakan akan berkooperatif dalam proses penyelidikan yang berlangsung dan menunggu hasil laboratorium resmi untuk kebutuhan evaluasi lanjutan.

Kejadian ini, tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak, tetapi juga menunjukkan

¹ CNN Indonesia, “7 Daerah yang Alami Keracunan MBG Versi BGN” CNN Indonesia, 27 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250927081552-20-1278281/7-daerah-yang-alami-keracunan-mbg-versi-bgn> (diakses pada 9 Mei 2026)

² Asih, “Diduga 15 Siswa di Pekalongan Keracunan MBG, Sampel Makanan Langsung Dikirim ke Semarang” Lingkar TV, 14 Januari 2026 <https://lingkartv.com/diduga-15-siswa-keracunan-mbg/> (diakses pada 9 Mei 2026)

adanya kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam aspek akuntabilitas, penyedia makanan belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan pasokan, serta mekanisme pengawasan oleh SPPG yang belum optimal. Terkait aspek transparansi, informasi mengenai sumber makanan, proses penyimpanan, atau risiko kesehatan belum tersampaikan secara optimal kepada orang tua, siswa atau masyarakat.

Di samping itu, meskipun regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur pengawasan terhadap aspek pangan, termasuk sumber, standar kualitas, keamanan, serta hak dan kewajiban negara dan masyarakat, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan sumber daya untuk inspeksi harian, pengujian sampel, dan protokol pencegahan kontaminasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi Kasus Insiden Keracunan Massal di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang penelitian, maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

(MBG)?

2. Bagaimana akibat hukum dari belum terpenuhinya penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Menganalisis akibat hukum dari belum terpenuhinya prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berkontribusi untuk peningkatan dalam literatur hukum tatanegara terkait penerapan *good governance* dalam program-program pemerintah, khususnya dalam program MBG. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai sumber referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis, diantaranya:

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program MBG.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman hukum mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam program MBG dengan mengkaji insiden keracunan massal.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi pembentukan hukum, serta dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki mekanisme implementasi program MBG melalui penerapan prinsip *good governance*, sehingga mengurangi risiko insiden keracunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Good Governance*

Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan, pemerintah tentunya bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mencapai kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. *Good governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dipahami sebagai konsep yang meliputi keseluruhan tindakan dan perilaku yang berperan mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi penyelenggaraan masalah publik guna mewujudkan nilai-nilai kebaikan (*good*) dikehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sementara itu, pengertian *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh Grindle dalam Amy Y.S. pada umumnya memuat berbagai karakteristik yang menggambarkan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dan

bersikap³.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan bahwa *good governace* merupakan penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat⁴.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan pada bidang ekonomi, politik, dan administratif dalam rangka mengelola berbagai urusan negara pada seluruh tingkatan. Prinsip utama *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*): Masyarakat mempunyai hak atau kesempatan untuk terlibat pada proses penetapan keputusan, baik dengan keterlibatan langsung maupun melalui mekanisme perwakilan lembaga.
- b. Penerapan hukum (*Rule of law*): Penerapan sistem hukum yang adil, serta dipatuhi oleh semua pihak seperti pemerintah dan masyarakat.
- c. Transparansi (*Tranparency*): Akses informasi terkait kebijakan, proses pengambilan keputusan dan kinerja pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (publik).
- d. Responsivitas (*Responsiveness*): Pemerintah

³ Ami. Y. S Rahayu, *Birokrasi & Governance Teori, Konsep Dan Aplikasinya* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2019).

⁴ Listyaningsih, *Adminitrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Graha Ilmu, 2014).

harus dapat merespons aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.

- e. Konsensus (*Consensus*) : Ketika pengambilan sebuah keputusan, pemerintah harus dapat mencapai kesepakatan yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
- f. Keadilan (*Equality*) : Pemerintah harus memastikan semua masyarakat diperlakukan adil dan setara dihadapan hukum.
- g. Akuntabilitas (*Accountability*) : Pemerintah memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang ditetapkan, serta harus siap untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan masyarakat.
- h. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and effeciency*): Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berdaya guna.
- i. Visi strategi (*Strategic visian*): Pemerintah memiliki rencana jangka panjang dan visi yang jelas untuk pembangunan berkelanjutan⁵.

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dalam membangun *good governance*. Keseluruhan prinsip tersebut menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang berkeadilan, efektif dan berintegritas dalam masyarakat.

⁵ Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan," *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2014).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk melihat posisi dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang belum dibahas secara mendalam. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai rujukan akademik, tetapi juga sebagai pijakan untuk memperkuat argumentasi ilmiah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, beberapa penelitian relevan disajikan dalam tabel berikut untuk memperlihatkan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang oleh Ikka Febryanti, Muhammad Alwiadi Pane, dan Pudji Astuti (2025) ⁶	Kualitatif	Hasil penelitian disajikan dalam Uraian deskriptif Berdasarkan indikator kebijakan, tata kelola, dan anggaran.	Sama-sama membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG).	Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan, tata kelola, dan anggaran, sedangkan penelitian Anda berfokus pada Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam perspektif

⁶ Ikka Febryanti et al., "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi

					hukum administrasi negara.
2.	Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Responsitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina oleh Andryan (2023) ⁷	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian disajikan secara naratif dengan menilai kondisi pelayanan publik dan tingkat responsivitas aparat.	Sama-sama mengkaji penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam suatu lembaga	Objek penelitiannya adalah kantor camat, sedangkan penelitian Anda berfokus pada lembaga pengelola MBG.
3.	Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-Nilai <i>Good Governance</i> : Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik oleh I Wayan Lendra, Daud Husni dan Yuyun	Kualitatif dengan studi pustaka dan analisis bibliometrik	Hasil penelitian berupa sintesis literatur dan analisis metadata yang menjelaskan relasi MBG dengan prinsip <i>good governance</i>	Sama-sama membahas MBG dan <i>good governance</i> .	Menggunakan studi pustaka dan analisis bibliometrik, sedangkan penelitian Anda menggunakan metode empiris Berbasis fakta lapangan.

Gratis (MBG) Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang,” *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>

⁷ Andryan, *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina*, Universitas Medan Area, SP Public Administration (Universitas Medan Area, 2023), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/20215>

	Fitriani (2025) ⁸				
4.	Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan oleh Mohamad Syaiful Aris, Ezra Tambunan, Dita Elvia Kusuma Putri, dan Xavier Nugraha (2022) ⁹	Penelitian yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Hasil penelitian disusun dalam bentuk analisis normatif terhadap peraturan dan konsep hukum yang berlaku.	Sama-sama menyoroti Prinsip <i>good governance</i> /AA UPB dalam suatu lembaga pelayanan.	Fokus pada layanan publik di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penelitian Anda membahas program MBG
5.	Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik oleh Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan <i>Systematic Literature Review</i> (SLR)	Hasil penelitian berupa analisis tematik dari berbagai sumber pustaka tentang MBG, keadilan sosial, dan	Sama-sama membahas program MBG.	Menggunakan perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik berbasis kepustakaan, sedangkan penelitian Anda menggunakan perspektif hukum dengan

⁸ I Wayan Lendra, Daud Husni, and Yuyun Fitriani, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 1 (2025).

⁹ Mohamad Syaiful Aris et al., "PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM," *Jurnal Litigasi* 23, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077>

	Khofidotur Rofiah (2025) ¹⁰		dinamika sosial-politik.		pendekatan empiris.
--	--	--	--------------------------	--	---------------------

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas program MBG dan prinsip *good governance* dari berbagai sudut pandang, baik melalui pendekatan kualitatif, studi pustaka, maupun kajian normatif. Namun, penelitian yang akan dilakukan memiliki keterbaruan karena menempatkan program MBG dalam kacamata hukum, khususnya hukum tata negara, dengan fokus pada penerapan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian relevan terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian yang menelaah kajian terhadap hukum yang berlaku dan kondisi nyata di masyarakat¹¹. Metode penelitian ini digunakan untuk mengamati hubungan antara hukum dan realita sosial dalam masyarakat. Secara harfiah metode penelitian yuridis-empiris sebagai penghubung antara ranah normatif hukum (*law in book*) dan praktik penerapannya dalam kehidupan nyata (*law in*

¹⁰ Anifatul Kitftiyah et al., "PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 05, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

action)¹². Dalam penelitian ini akan mengamati penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan program MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi¹³. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Presiden (PerPres) No. 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dimanfaatkan sebagai acuan dalam memahami dan menyelesaikan perkara hukum. Dalam penelitian ini pendekatan kasus didasarkan pada dugaan kasus keracunan yang terjadi di SD Negeri 01 Kedungwuni.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pandangan, gagasan, serta doktrin para ahli terkait suatu isu hukum. Dalam penelitian

¹² Amad Sudiro, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Purbalingga: Diva Pustaka, 2025).

¹³ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014).

ini pendekatan konseptual menganalisis teori *good governance* dan konsep Makan Bergizi Gratis.

Kombinasi pendekatan tersebut dinilai tepat untuk untuk menganalisis, mengkaji dan menelaah penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di SD Negeri 01 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini ditemukan permasalahan hukum yang berkaitan dengan dugaan keracunan yang terjadi di SD Negeri 01 Kedungwuni, dimana hal tersebut perlu diketahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* yang belum pernah di teliti sebelumnya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung di lapangan antara penulis dengan sumber data. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi yang penulis dapatkan dari para pihak yang dijadikan sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan¹⁴. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan

¹⁴ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, n.d.).

bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang penerapannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara¹⁵. Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- (a). UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- (b). UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- (c). PerPres No. 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum¹⁶. Penelitian ini menggunakan buku-buku, laporan penelitian hukum dan tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku atau jurnal-jurnal

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data, yakni :

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Dilakukan terhadap informan kunci dengan menggunakan panduan wawancara semi-

¹⁵ Purwaningsih.

¹⁶ Purwaningsih.

terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau daring (jika diperlukan). Pertanyaan difokuskan pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan di SD Negeri 01 Kedungwuni. Proses wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskripsikan untuk analisis lebih. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu:

1) Guru

- a) Ibu Subikha, S. Pd. selaku ketua koordinator program MBG
- b) Ibu Lulu Sania Dienti, S. Pd. selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan program MBG.
- c) Ibu Nuning Nurhayati, S. Pd. selaku pelaksana harian 1 program MBG
- d) Ibu Siti Choyimah, S. Pd. selaku pelaksana harian 2 program MBG.
- e) Bapak Beni Handoko, S.Pd. selaku guru pendamping kelas

2) Orang Tua Siswa

- a) Ibu dengan inisial S/Orang tua siswa kelas V
- b) Ibu dengan inisial R/Orang tua siswa kelas VI

3) Siswa

- a) Siswa kelas V dengan inisial R
- b) Siswa kelas VI dengan inisial Z

b. Studi dokumen (*document study*)

Melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen hukum, kebijakan, dan laporan resmi terkait *good governance*, program MBG, serta insiden keracunan. Teknik ini mencakup penelusuran arsip di perpustakaan hukum, situs

resmi pemerintah (seperti situs Kementerian Kesehatan dan BGN), dan media massa untuk mendapatkan data sekunder yang akurat.

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan etika penelitian, termasuk memperoleh *informed consent* dari narasumber, melindungi kerahasiaan data, serta menghindari bias melalui triangulasi sumber.

6. Teknik validitas data

Triangulasi merupakan metode menguji keabsahan data dengan cara mengoptimalkan proses pencocokan anantara hasil wawancara dengan objek penelitian¹⁷. Menurut Lexy dalam Endang Purwaningsih menyebutkan bahwa keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian yuridis-empiris, pembuktian kebenaran dilakukan dengan:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan lain dan dengan responden hasil wawancara.
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumen dan studi kepustakaan¹⁸.

Dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dilakukan melalui:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih sumber data untuk memverifikasi dan memperkaya hasil

¹⁷ Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

¹⁸ Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*.

penelitian¹⁹. Membandingkan data dari multiple sumber, seperti membandingkan pernyataan wawancara dengan dokumen resmi atau laporan kesehatan untuk mengkonfirmasi fakta insiden keracunan. Dalam penelitian ini data dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan kepada Guru, Orang tua siswa dan Siswa di SD Negeri 01 Kedungwuni lalu dikonfirmasi kembali dengan data yang dimiliki oleh sekolah.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode dapat didefinisikan sebagai kombinasi berbagai teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam satu studi untuk memverifikasi konsistensi dan keandalan temuan²⁰, seperti memastikan bahwa analisis norma hukum didukung oleh observasi lapangan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data tidak hanya melalui wawancara tetapi dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, jurnal dan perundang-undangan untuk memperkuat kevaliditasan data.

c. Triangulasi teori

Triangulasi teori dapat didefinisikan sebagai penggunaan berbagai kerangka teori untuk menganalisis data atau fenomena yang sama²¹. Mengintegrasikan teori hukum dengan data empiris untuk mengevaluasi konsistensi, seperti menggunakan teori *good governance* untuk menafsirkan bukti dari kasus dan menghindari bias

¹⁹ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Balikpapan, 2024), Borneo Novelty Publishing.

²⁰ Arianto.

²¹ Arianto.

subjektif. Penelitian ini diperkuat dengan penggunaan teori *good governance* dan konsep MBG dalam menganalisis data.

d. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat didefinisikan sebagai penggunaan berbagai titik waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena²². Penelitian ini diperkuat dengan wawancara kepada pihak Guru, Orang Tua, dan Siswa dengan rentang waktu beberapa hari dengan pertanyaan yang sama untuk memastikan stabilitas temuan.

7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dikutip dalam Sugiyono menyatakan analisis data yaitu kegiatan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara dinamis dan berlanjutan hingga mencapai kejenuhan data. Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki sifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif²³. Oleh karena itu penulis akan menggunakan teknik analisis data deskriptif

Pada analisis deskriptif, peneliti menjelaskan fakta hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan kasus tanpa memberikan penilaian. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta peristiwa hukum, pada penelitian ini berarti terjadinya dugaan keracunan di SD Negeri 01 Kedungwuni akibat mengkonsumsi MBG. Selanjutnya mendeskripsikan

²² Arianto.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

keterkaitan antara insiden tersebut dengan prinsip *good governance* atau AAUPB, dan terakhir menjelaskan kerangka normatif yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun lima bab dengan sub bagian di setiap bab, untuk menciptakan struktur penulisan yang sistematis sekaligus mempermudah pembaca memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Kerangka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORITIS

Bagian ini memaparkan teori yang menjadi landasan penelitian yakni teori *good governance* dan konsep makan bergizi gratis.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

BAB IV. PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pembahasan rumusan masalah mengenai penerapan prinsip *good governance* dan akibat hukum belum terlaksananya penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini terbagi menjadi tiga sub-bab yakni kesimpulan, saran dan limitasi kajian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) SD Negeri 01 Kedungwuni menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip *good governance* namun terdapat kegagalan dalam khususnya pada prinsip transparansi dan *rule of law*. Sekolah sudah menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha melaksanakan program secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan ini diperkuat dengan wawancara bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan beberapa kekurangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi *good governance* dalam program MBG masih berada pada tahap awal dan membutuhkan penguatan yang lebih sistematis agar tidak hanya berjalan secara komunikatif, tetapi juga memiliki dasar administratif, prosedural dan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 01 Kedungwuni masih memerlukan pembenahan yang serius agar benar-benar mencerminkan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, kelemahan dalam penerapan *good governance* tersebut berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum bagi sekolah, orang tua, siswa, maupun pemerintah sebagai pihak pengawas. Ketiadaan dokumen persetujuan yang memadai dapat melemahkan dasar hukum partisipasi siswa, sedangkan tidak tersedianya papan informasi nutrisi dan ketiadaan SOP tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan prosedur operasional. Kondisi ini

bukan sekedar masalah teknis administrasi, tetapi juga dapat berdampak pada munculnya kesulitan pertanggungjawaban, potensi sanksi administratif, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Perbaikan tata kelola MBG perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penyusunan SOP yang jelas, penerapan transparansi, peningkatan kapasitas para pihak, serta monitoring dan evaluasi yang responsif. Langkah ini penting untuk memperkuat good governance, melindungi hak anak, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan program MBG.

B. Saran

1. Bagi SPPG, perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi tertulis yang bersifat operasional, baik berupa SOP, petunjuk teknis, maupun petunjuk pelaksana, agar program MBG memiliki dasar hukum yang jelas, memberikan kepastian hukum bagi sekolah, serta mencegah terjadinya kekosongan norma dalam implementasi di lapangan.
2. Bagi pihak sekolah, perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan program MBG didukung oleh dokumen hukum yang memadai, seperti persetujuan tertulis orang tua, logbook penerimaan dan distribusi makanan, serta bukti pelaksanaan pengawasan. Hal ini penting untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan sebagai alat bukti apabila terjadi pemasalahan hukum di kemudian hari.
3. Bagi orang tua siswa, perlu diberikan sosialisasi hukum yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan program MBG, termasuk risiko, mekanisme pengaduan, serta bentuk tanggungjawab para pihak, sehingga

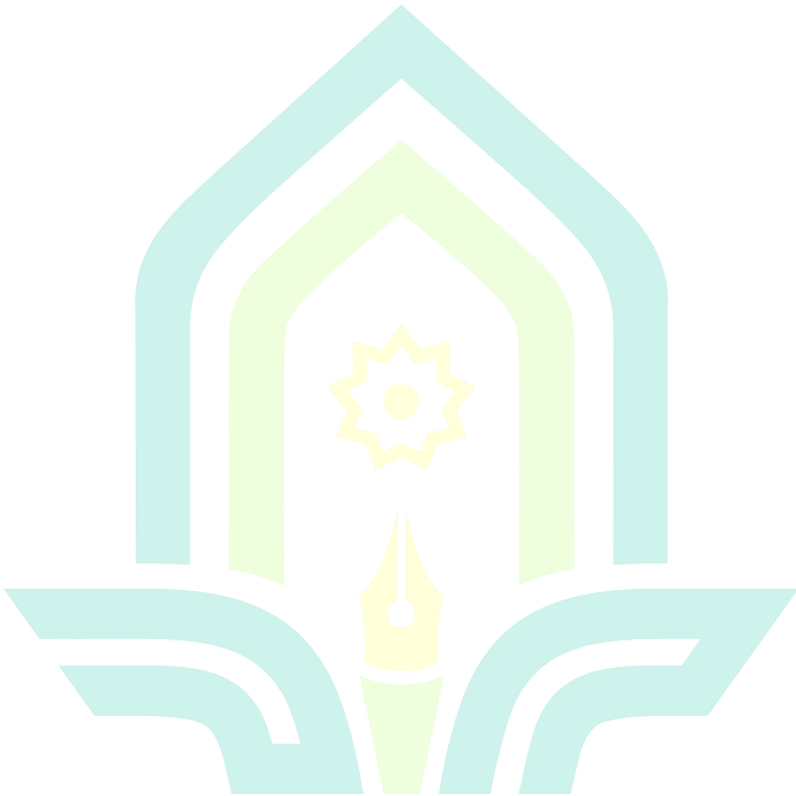
persetujuan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdasarkan pemahaman hukum yang memadai.

4. Bagi komite sekolah, perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terdokumentasi agar fungsi kontrol sosial berjalan efektif. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak siswa.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan program MBG, khususnya terkait tanggung jawab perdata, administratif, maupun potensi tanggung jawab negara apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi peserta didik.

C. Limitasi Kajian

Keterbatasan penelitian ini antara lain disebabkan oleh akses peneliti terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memungkinkan. Pihak SPPG menolak untuk diwawancarai dan tidak tersedia petunjuk teknis atau pedoman resmi mengenai perizinan penelitian di institusi tersebut, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh data primer langsung dari SPPG. Akibatnya, sumber data dalam penelitian ini terbatas pada hasil wawancara dengan pihak sekolah, orang tua, dan siswa, serta dokumentasi lain yang tersedia secara eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi kedalaman dan kelengkapan informasi mengenai praktik dan kebijakan internal SPPG. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjangkau SPPG secara lebih luas, baik melalui pendekatan izin

yang lebih panjang, kerja sama kelembagaan, maupun metode alternatif seperti studi partisipatif. Sehingga, memungkinkan pengumpulan data primer yang lebih komprehensif dan valid.



DAFTAR PUSTAKA

- (CISDI), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. "Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis – Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, Dan Monitoring Evaluasi Pada Program MBG," 2025. <https://cdn.cisdi.org/documents/fnm-Policy-PaperMengkaji-Program-Makan-Bergizi-GratisSeri-Keduapdf-1738801590233-fnm.pdf>.
- Anggara, Sahya. Hukum Administrasi Negara. Vol. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Ani, Jihansyah, Bode Lumanauw, and Jeffry L. A Tampenawas. Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia. 663 Jurnal EMBA. Vol. 9. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021.
- Arianto, Bambang. Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif. Balikpapan, 2024.
- Borneo Novelty Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arsip Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Konvensi Hak Anak (Wujud Nyata Upaya Perlindungan Terhadap Anak)," n.d.
- Asih. "Diduga 15 Siswa Di Pekalongan Keracunan MBG, Sampel Makanan Langsung Dikirim Ke Semarang." Lingkar TV, 2026. <https://lingkartv.com/diduga-15-siswa-keracunan-mbg/>.
- Badan Gizi Nasional. "Good Governance Jadi Roh Program Makan Bergizi Gratis." bgn.go.id, 2025.

- <https://www.bgn.go.id/news/berita/good-governance-jadi-roh-program-makan-bergizi-gratis>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Kedungwuni Dakan Angka 2025, 2025.
- Budi Pratiwi, Berliana, Reno Affrian, and Siti Raudah. "Penerapan Good Governance Pada Badan." *Jurnal MSDM* 1, no. 3 (2024).
- Cholik Mutaqin, Ade\ Kerangka Hukum Hak Atas Pangan Dan Gizi Di Indonesia. Edited by Linda Kaun. FIAN Indonesia. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- Febriyanti, Ikka, Indianti, Muhammad Alwiadi Pane, and Pudji Astuti. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025).<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>.
- Rochman, Meuthia. Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan. Jakarta: ELSAM, 1997.
- Hadad, Tini. "Hak Asasi Manusia Sebagai Pembangunan Parameter." *Jurnal HAM* 3 (2005).
- Haryoko, Sapto, Bahtiar, and Fajar Arwadi. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Hidayat, Rahmat, and Abdillah. Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori Dan Aplikasinya. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.
- I, Rodiyah, Sukmana H, and L. Mursyidah. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. Survei Status

- Gizi (SSGI) 2024 Dalam Angka, 2025.
- Irawan, Okky, Savarius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida, and Sufiarina. Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2. Jakarta, 2025.
- <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Irene Matitaputty, Merlien, Sidi Ahyar Wiraguna, and Harly Clifford Jonas Salmon.
- Hukum Administrasi Negara*. Vol. 32. Widina Media Utama, 2024.
- Irwanto. *Good Governance : Konsep, Prinsip Dan Implementasi*. Riau: Mutiara Publishing Indonesia, 2025.
- Ishak, Narfaika, Rahmad Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *Bestuur* 8, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>.
- J. Ibrahim, Hapsah, Ikhfan Haris, and Arwildayanto. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Pohuwato." *Normalita* 9 (2021).
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, n.d.
- Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Jurnal of Law, Society, and Civilization (JoLSIC)*, 2021.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Justiano, Faathir. *Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.

- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman. Jurnal Sapientia Et Virtus. Vol. 7, n.d.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. "Panduan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Satuan Pendidikan." Direktorat Jendral PendidikanAnak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025.
- Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penerapan Edited by Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan." Jurnal Buletin Studi Ekonomi 19, no. 1 (2014).
- Kitftiyah, Anifatul, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, and Khofidotur Rofiah. "PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan." Pancasila: Jurnal KeindonesiaanKeindonesiaan 05, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Lendra, I Wayan, Daud Husni, and Yuyun Fitriani. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai." Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) 5, no. 1 (2025).
- Lina Sinaulan, Ramlani. Buku Teori Ilmu Hukum. Zahir Publishing, 2021. Listyaningsih. Adminitrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi. Jakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Maggalatung, Salman. Prinsip-Prinsip Penerapan Hukum, Keadilan, Dan HAM. Edited by Mukhtar Alshodiq. Jakarta: Focus Grahamedia, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014. Miles, Matthew, A. Michael

- Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. United States of America: SAGE Publications. Inc, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa, Delly. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Shira Carmela Permadi. *Teori Penerapan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum*. Pendidikan, Seni, Sains, Sosial Humanioral. Bandung, 2023. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Nugraha, Satriya, Mia Amalia, Handrianus, and Fitri Maulina Alviani. *Hukum Dan Masyarakat*. Tahkim. Vol. 10. Nuta Media, 2023. https://www.researchgate.net/publication/360160521_Hukum_dan_Masyarakat.
- Nurhidayat, Ipan. *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*. Journal Education and Government Wiyata. Vol. 1. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Nurlina, Ferdian Utama, Sri Ayu Laali, and Chaterina Yenni. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Edited by Andi Asari. Solok, Sumatera Barat: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, n.d.
- Rahayu, Ami. Y. S. *Birokrasi & Governance Teori, Konsep Dan Aplikasinya*. Depok: PT. Grafindo Persada, 2019.
- Rasul, Sjahrudin. *Penerapan Good Governance Di*

- Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 21, n.d. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Rodliyah, St. Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan. Jember: IAIN Jember Press, 2021. Rohayatin, Titin. Birokrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Depublish, 2021.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*. Laksbang Mediana, 2008.
- Samuel Sitohang, Jus. "Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.880>.
- Saputri Yanuari, Fira, and Daffa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." *Padjajaran Law Review* 8, no. 1 (2020).
- Setyana Pratiwi, Cekli, Christina Yulita, Fauzi, and Shinta Ayu Purnamawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Hukum Administra Negara. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2025.
- Sia. "7 Daerah Yang Alami Keracunan MBG Versi BGN." *CNN Indonesia*, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250927081552-20-1278281/7-daerah-yang-alami-keracunan-mbg-versi-bgn>.

- Siregar, Bismar, Abdul Hakim, Suwantji Sisworahardjo, and Arif Gosita. HUKUM DAN HAK-HAK ANAK. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Soleh, Muhammad. Pengantar Ilmu Pendidikan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Strategika, Berka. "Tata Kelola Dan Rekomendasi Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," 2025.
- Sudiro, Amad. Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis. Purbalingga: Diva Pustaka, 2025.
- Sulaksono. Teori-Teori Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Syafliansah, Esto Royani, and Juni Gultom. Metode Penelitian Hukum. Edited by Weni Yuliani. Yogyakarta. Zahir Publishing, 2025.
- Syaiful Aris, Mohamad, Ezra Tambunan, Dita Elvia Kusuma Putri, and Xavier Nugraha. "PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM." *Jurnal Litigasi* 23, no. 2 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077>.
- Syamsudduha. Governance Dalam Manajemen Pendidikan. Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Syarif, Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Padang: Get Press Indonesia, 2024. Ulum, Wizdan. "Prinsip-Prinsip Umum Dalam Penerapan Hukum," 2025.
- Yadiman. Kajian Program MBG (Makan Bergizi Gratis), 2025.

- Yuwana, Rima. Hak Anak (Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak). Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zalimi, Mohamad. “Menghindari Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif” 7, no. 2 (2015).
- Zufirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.” Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP 3, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

